

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali melalui penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali. RKPD juga mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

4.1. Visi, Misi, Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi-Misi pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"**. Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Visi dan misi tersebut diatas selanjutnya dirumuskan kedalam 9 agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan *NAWA CITA* yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) dimensi pembangunan memiliki sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental;

Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat yang secara umum mencakup :

- a. peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan berbagai sasaran di bidang pendidikan antara lain rata-rata lama sekolah serta angka melek aksara dan berbagai sasaran lainnya di bidang pendidikan.
- b. Peningkatan pada akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat,
- c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan.
- d. Peningkatan akses terhadap perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta akses air minum dan sanitasi yang layak.

2. Pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri

Sasaran pembangunan sektor unggulan yaitu :

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri untuk berbagai komoditas seperti padi, jagung, kedelai, gula serta produksi daging dan ikan.
- b. Pengembangan berbagai produksi sumber-sumber energi seperti minyak bumi, gas bumi dan batubara serta peningkatan rasio elektrifikasi serta konsumsi listrik perkapita.
- c. Memperkuat jatidiri sebagai negara maritim yang mencakup penyelesaian batas maritim dan pencatatan pulau-pulau kecil;
- d. Membangun konektivitas nasional yang mencakup pengembangan tol laut, pelabuhan dan kapal perintis
- e. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan yang mencakup pengembangan pelabuhan perikanan, peningkatan konservasi laut dan produksi perikanan.
- f. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan industri dalam perekonomian

3. Pemerataan dan kewilayahan.

sasaran pembangunan kewilayahan dan antarwilayah meliputi :

- a. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan
- b. Pengembangan kawasan perbatasan
- c. Pembangunan daerah tertinggal
- d. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa

4.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 adalah:

“BALI MANDARA”

Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera

“**Bali Maju**” adalah Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia. Bali yang senantiasa bergerak dan maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keiklasan demi tegaknya dharma. Bali yang maju adalah Bali yang harus tetap “*metaksu*” yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sebagai daerah tujuan wisata

yang handal, berkarisma dan religius. Bali yang maju adalah Bali yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu (Bali) serta adat istiadat Bali. Kemodernan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peradaban sebagai masyarakat yang berada di perkampungan dunia yang terbuka.

“Bali Aman” adalah Bali yang *“dabdad”* teratur *sekala niskala*. Bali yang memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan nya sejalan dengan konsep *Tri Hita Karana*. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan *Tri Hita Karana* seperti: terorisme, anarkisme dan virus *non traditional threat* lainnya yang mewarnai *jaman Kali*.

“Bali Damai” adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir bathin serta selalu dalam kondisi *“tis”* dan kondusif. Bali Damai adalah Bali yang menggambarkan adanya komunitas masyarakat Bali, baik di perkotaan maupun pelosok pedesaan yang kental dengan suasana *“briyag-briyug, pakedek pakenyem”*. Hal tersebut sebagai indikator optimisme masyarakat dalam menatap masa depan yang menjanjikan.

“Bali yang Sejahtera” adalah Bali yang *“sukerta sekala niskala”* sebagai diperolehnya kemajuan, keamanan dan kedamaian yang sejati. Artinya, segala aspek kejadian yang bervibrasi spiritual dan kontekstual potensial menyebabkan Daerah dan Masyarakat Bali maju, aman serta terasanya kedamaian, akan mengantarkan Daerah dan Masyarakat Bali pada kesejahteraan hidup sepanjang masa.

Visi Pemerintah Provinsi Bali tersebut diatas dilaksanakan melalui 3 (tiga) misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan Bali yang Berbudaya, *Metaksu*, Dinamis, Maju dan Modern.
2. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman.
3. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan *Sukerta* Lahir Bhatin.

Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali dalam jangka waktu lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut :



- 1) Meningkatkan; mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa.

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya akses dan mutu pada layanan pendidikan serta terlaksananya wajib belajar 12 tahun.
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - c. Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia.
 - d. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan kesehatan.
 - e. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan.
 - f. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan.
 - g. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.
 - h. Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam berpolitik.
 - i. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - j. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - k. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- 2) Mewujudkan pengaturan tata ruang, meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, pengendalian dan pengaturan pertumbuhan serta persebaran penduduk, meningkatkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta mewujudkan sistem keamanan yang berstandar internasional.
- dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
- a. Terwujudnya pengaturan tata ruang.
 - b. Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku.
 - c. Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali.
 - d. Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan.



- e. Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama.
 - f. Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional.
 - g. Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali.
- 3) Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan), pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana publik.

dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh.
- b. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi.
- c. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah.
- d. Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi.
- e. Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali.
- f. Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian.
- h. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan.
- i. Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.
- j. Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata.
- k. Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan.
- l. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
- m. Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial.



Tabel 4.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi : "Bali Mandara Jilid 2", Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera				
No	Misi		Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern		Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan serta terlaksananya wajib belajar 12 tahun
				- Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan
				- Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia
				- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				- Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan kesehatan
				- Meningkatnya peran gender dalam pembangunan
				- Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
				- Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik
				- Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)
				- Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan
				- Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku
				- Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali



No	Misi		Tujuan		Sasaran
				-	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional
				-	Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali
				-	Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama
2	Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman		Mewujudkan pengaturan tata ruang, meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, pengendalian dan pengaturan pertumbuhan serta persebaran penduduk, meningkatkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta mewujudkan sistem keamanan yang berstandar internasional.	-	Terwujudnya pengaturan tata ruang.
				-	Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku
				-	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
				-	Terkendalnya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan
				-	Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama
				-	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional
				-	Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali



No	Misi		Tujuan		Sasaran
3	Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin		Meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan), pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana publik	-	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan
				-	Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata
				-	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh
				-	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi
				-	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah
				-	Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi
				-	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
				-	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
				-	Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali
				-	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian
				-	Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian
				-	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan
				-	Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali secara umum telah sejalan dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat antara lain seperti (1)Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, (2) Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, (3)Penyediaan Energi dan infrastruktur lainnya, (4)Pengembangan sektor industri dan UMKM, (5)Peningkatan tata kelola dan pelayanan birokrasi, serta (6)Pemerataan pembangunan antar wilayah.

4.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2016, yaitu :

1. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, sektor ekonomi dan masyarakat;
2. Ketahanan pangan dan penganekaragaman sumber karbohidrat non beras;
3. Tata kelola pemerintahan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
4. Peningkatan mutu sarana dan layanan bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat;
5. Penurunan daya dukung ekosistem dan lingkungan meliputi sumber daya air, udara dan tanah, peningkatan sanitasi dan pengelolaan sampah serta alih fungsi lahan;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi kapasitas lembaga adat.

4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan serta Tema Pembangunan Daerah Tahun 2016

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, serta isu strategis di Provinsi Bali, maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 ditetapkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
Prioritas 3 : Kesehatan
Prioritas 4 : Pendidikan
Prioritas 5 : Infrastruktur



- Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana
- Prioritas 7 : Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Prioritas 8 : Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Prioritas 9 : Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM
- Prioritas 10 : Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

Tabel 4.2
Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi Bali

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah	
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara	1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2	Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	2	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	3	Kesehatan
4	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	4	Pendidikan
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	5	Infrastruktur
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	6	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	7	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	8	Pertanian dan Ketahanan Pangan
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik	9	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM
		10	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan
Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	-	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)
		-	Meningkatnya peran gender dalam pembangunan
2	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	-	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
		-	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan
3	Kesehatan	-	Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan
		-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		-	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kesehatan
4	Pendidikan	-	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan
		-	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan
		-	Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia
5	Infrastruktur	-	Terpeliharanya sumber daya air dan terpenuhinya ketersediaan air baku
		-	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur
6	Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana	-	Meningkatnya pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pelestarian panorama alam Bali
		-	Terwujudnya pengaturan tata ruang
7	Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
		-	Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali



		-	Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan
8	Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali
		-	Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian
		-	Berkembangnya komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian
		-	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan
		-	Meningkatnya lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan per kapita dan kesejahteraan masyarakat
		-	Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata
9	Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM	-	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh
		-	Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi
		-	Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah
		-	Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi
10	Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	-	Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik
		-	Terkendalinya pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan
		-	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional
		-	Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut :

“ Meningkatkan daya saing daerah dengan dukungan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik menuju bali mandara ”

4.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 serta prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2016 disusun sebagai berikut :

1. Mengintensifkan Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Dalam peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa profesionalitas aparatur dan efektivitas kelembagaan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Strategi ini juga menekankan perbaikan tata laksana, akuntabilitas, dan terbebasnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dari KKN. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu

1. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai pada tingkat provinsi melalui pendidikan, pelatihan, dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan.
3. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Mengendalikan Tingginya Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan Sebaran Penduduk Antar Kabupaten/Kota

Masalah kependudukan akan menjadi sumber berbagai masalah yang sudah dan akan terjadi di Bali, antara lain: masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Pertumbuhan penduduk di Bali meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,26% dalam satu tahun pada periode 1990-2000 menjadi 2,15% pada periode 2000-2010. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu



1. Mengendalikan pertumbuhan, persebaran, dan administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi dan infrastruktur pendukungnya di Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
3. Meningkatkan nilai tukar hasil pertanian dalam upaya untuk mengurangi arus urbanisasi.
4. Meningkatkan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi, vasektomi dan implant).
5. Peningkatan akses pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) muda yang memiliki 2 anak, PUS dari keluarga miskin, PUS di wilayah kumuh, PUS di wilayah padat penduduk pendatang.
6. Penguatan kapasitas kelembagaan dan program kependudukan dan KB di kabupaten/kota.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Walaupun capaian angka kemiskinan di Bali sudah sangat jauh menurun, tetapi di masa yang akan datang jumlah penduduk miskin di Bali masih tetap ada. Langkah mendasar strategi ini adalah bagaimana penurunan penduduk miskin dapat terus ditingkatkan dan bagaimana tidak terjadi lagi penduduk miskin baru akibat kurangnya kesempatan bekerja atau karena hal lainnya. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

- a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Bali secara profesional, proporsional dan berkelanjutan.
- b. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- c. Meningkatkan pengembangan pembangunan berbasis Desa Terpadu (Gerbangsadu).
- d. Melakukan peningkatan pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah).
- e. Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah social.
- f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat seperti; mendorong Investasi PMA dan PMDN yang berbudaya local dan perizinan.

- g. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih merata antar wilayah.
- h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan , termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus kepada penduduk yang kurang mampu.

4. Mengembangkan Upaya-upaya Preventif, Promotif, Kuratif yang Seimbang dan Berkesinambungan dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Langkah mendasar strategi ini adalah antara lain peningkatan kapasitas kinerja tenaga kesehatan hingga perbaikan infrastruktur kesehatan untuk mempercepat penjaminan kesehatan masyarakat Bali secara merata. Adapun arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

- a. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan dan rehabilitasi) penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, demam dengue, TBC dan rabies.
- b. Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu.
- c. Meningkatkan upaya pencarian (*case finding*) anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang.
- d. Meningkatkan pengamatan (*surveilans*) terhadap *emerging diseases* seperti avian influenza, SARS, dan lain-lainnya.
- e. Mengembangkan kesehatan wisata (*travel health*) dalam hal pencegahan penyakit pada wisatawan dan pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang sakit.
- f. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.
- g. Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan.
- h. Memantapkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terutama dalam masa transisi dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
- i. Meningkatkan ruang rawat inap kelas III di rumah sakit.

5. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Mengimplementasikan Sistem Pendidikan Disesuaikan dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Suatu perbaikan sistem memerlukan perencanaan yang holistik terhadap seluruh pelaku sistem, baik aspek manajemen (organisasi,

prosedur, dan pengendalian), aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan), sarana dan prasarana, faktor penunjang lain bagi peserta didik, dan infrastruktur pendidikan, dan komponen lainnya. Suatu perbaikan sistem diharapkan dapat mengefisiensikan biaya dan mengefektifkan tujuan sistem pendidikan antara lain menghasilkan siswa yang bermutu dan sesuai kriteria. Arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.
- b. Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (*accountability*) dan jaminan mutu (*quality assurance*).
- c. Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2 dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada keharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama; sementara dimensi global menuntut agar segala aktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringan kerjasama.
- d. Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
- e. Mengupayakan untuk memperkuat lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian budaya yang adiluhung.
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus (bea siswa) kepada penduduk yang kurang mampu.
- g. Mengembangkan pendidikan berbasis kejuruan sesuai kebutuhan pasar.
- h. Meminimalkan ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah antar kabupaten/kota.
- i. Meningkatkan kualifikasi guru dan kualitas proses pembelajaran

6. Pengembangan Infrastruktur

Salah satu pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan ekonomi Bali yang masih belum merata, sehingga masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah utara, selatan, dan barat serta timur Bali.

Pengembangan dan peningkatan infrastruktur yang baik diseluruh kawasan/wilayah Bali, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan ekonomi terutama potensi-potensi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan atau di pusat-pusat ekonomi kerakyatan yang ada di daerah di Provinsi Bali.

Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

1. Mewujudkan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air, pelayanan air minum dan sanitasi serta fungsi jaringan irigasi untuk mendukung derajat kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan prasarana dan sarana publik yang memadai, terutama pada wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi, agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara.
3. Perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan atau sustainable untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, serta dengan lebih mengutamakan *quality tourism*.
4. Mewujudkan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan terintegrasi, guna mendukung terciptanya keseimbangan pembangunan antar wilayah dan konektivitas wilayah.
5. Melakukan upaya-upaya penanganan kemacetan lalu lintas.

7. Penataan Ruang, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

Strategi penataan ruang memiliki prioritas penting karena akan menjadi pedoman dalam implementasi program pembangunan pemanfaatan ruang dan program kewilayahan. Strategi ini mengedepankan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan sehingga arah pembangunan daerah dapat ditentukan jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah.

Strategi ini juga mengedepankan pengendalian lingkungan hidup sebagai syarat pembangunan berkelanjutan. Bagaimana pengelolaan limbah dapat berjalan dengan baik di masyarakat sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan di Bali dapat ditekan. Bali yang hijau dan bersih dapat diupayakan terwujud dalam setiap gerak pembangunan yang dilakukan.

Strategi dalam pengelolaan bencana dilaksanakan dengan memberi prioritas pada Pengurangan Resiko Bencana dengan melaksanakan kegiatan secara menyeluruh baik pada saat Pra bencana, saat Bencana dan



Pasca Bencana. Adapun arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

1. Melindungi Bali sebagai pulau yang “unik” sebuah pulau yang memiliki kelengkapan ciri geografis, namun tidak memiliki sumber daya alam bawah tanah yang memadai.
2. Mengoptimalkan potensi, keselarasan tatanan kehidupan modern, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam, mengkreasi Bali lama/lama dalam kekinian, mengembangkan sistem budaya yang berorientasi kepada tatanan lingkungan hidup.
3. Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan sosialisasi peraturan/perda tata ruang dan peruntukan. Didukung dengan kesungguhan operasional pengendalian dan menindak pelanggaran tata ruang.
4. Mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah perlindungan jurang.
5. Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, pembangunan hutan kesejahteraan, hutan kota dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan, serta penanaman terumbu karang, budidaya kerang dan perikanan pantai, pengendalian pemanfaatan pantai dan laut.
6. Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang, karena banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga proporsi pemanfaatan ruang optimal dan kelestarian manfaat mantap berkelanjutan dalam keseimbangan dinamika perubahan.
7. Peningkatan pengelolaan limbah/sampah padat dan cair.
8. Peningkatan pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam serta pelestarian panorama alam.
9. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.
10. Mewujudkan Bali Bersih dan Hijau (*Clean and Green*).
11. Penanggulangan bencana dengan prioritas pada pengurangan resiko bencana (PRB), peningkatan kapasitas respon, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan pemulihan pasca bencana.



8. Meningkatkan Peran Lembaga Adat dalam Mengembangkan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Pemerintah daerah berupaya melindungi kelestarian budaya dan eksistensi lembaga-lembaga adat yang ada, memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan meningkatkan Pemberdayaan Desa Pekraman dan Subak/Subak Abian. Pelestarian budaya adat Bali secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pula pada pelestarian pariwisata di Bali sebagai lokomotif pembangunan ekonomi di Bali. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

1. Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan, yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kelestarian budaya.
2. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelestarian nilai-nilai budaya dan apresiasi terhadap kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.
4. Meningkatkan peran desa pakraman dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.
5. Memberdayakan peran subak dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat subak.
6. Meningkatkan peran banjar dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.
7. Memberdayakan peran sekaa dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya.
8. Meningkatkan peran Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), dan Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat.
9. Memberdayakan Sekaa Teruna Teruni dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, kesenian dan kearifan lokal masyarakat.

9. Peningkatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan pariwisata yang sangat pesat di Bali, merupakan salah satu keberhasilan masyarakat Bali dalam mempertahankan sendi-sendi budaya lokal. Pemerintah daerah akan proaktif memfasilitasi proses dan agenda pembangunan yang dapat memelihara nilai-nilai budaya daerah, serta memberikan kesempatan ruang gerak yang lebih banyak untuk pembangunan yang berorientasi pada pengembangan budaya lokal dan ekonomi kreatif. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

- a. Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan menjunjung kearifan lokal guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengembangkan “pariwisata kerakyatan” di wilayah pedesaan dan mengintegrasikan dengan sektor pertanian seperti pembangunan jogging track dan agrowisata pedesaan sehingga dapat memberikan efek ganda (*multiflier effect*) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali.
- c. Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola peningkatan kontribusi dunia pariwisata terhadap pelestarian budaya.
- d. Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi rejuvenation atau penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis (*decline*) kegiatan pariwisata.
- e. Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri pariwisata Bali, yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen pariwisata.
- f. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana, pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya.
- g. Peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata.
- h. Pengembangan ekonomi kreatif.

10. Mempercepat Peningkatan Produksi Pertanian dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatkan Pendapatan Petani

Strategi ini mengupayakan langkah-langkah meningkatkan produksi pangan di daerah baik melalui peningkatan ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian dalam arti luas, sehingga dapat menekan alih fungsi lahan. Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sdm Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

1. Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan SDM Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtera dan berkeadilan.
3. Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi pupuk, subsidi pakan ternak, subsidi benih dan bibit ternak, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
4. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil industri pertanian.
5. Peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).
6. Pengembangan dan pemantapan komoditas andalan/unggulan pertanian.
7. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas.
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan.
9. Penuntasan kasus penyakit asal hewan dan penyakit ternak.
10. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat Bali.

11. Peningkatan Investasi, Pengembangan Industri Kecil, Koperasi dan UMKM

Pertumbuhan ekonomi di Bali sangat ditentukan oleh pertumbuhan industri kecil dan menengah. Industri ini umumnya bersifat industri rumah tangga, dan masih banyak mengalami kesulitan dalam permodalan. Dalam strategi ini lebih difokuskan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kualitas manajemen dan permodalan untuk mendorong tumbuhnya investasi di daerah. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

1. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu disain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.
2. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi.
3. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.
4. Merevitalisasi pasar tradisional di perdesaan sehingga terkesan lebih modern
5. Penyederhanaan kebijakan dan aturan main berinvestasi, sehingga dapat menarik investor yang dibutuhkan.
6. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
7. Peningkatan dan pemerataan iklim investasi.
8. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor.
10. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.

12. Menjaga Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

Sektor keamanan sangat berperan aktif dalam menjaga stabilitas daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat berlangsung dengan baik. Dalam strategi ini memfokuskan bagaimana menjaga Bali tetap aman sehingga perkembangan pariwisata berjalan dengan baik. Arah kebijakan pembangunan yang ditempuh, yaitu :

1. Memujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat



luas, serta mampu memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

2. Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai politik.
3. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.
4. Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir bathin.
5. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan DPRD, kepolisian, Kejaksaan, TNI, lembaga tradisional, LSM dan masyarakat luas, dalam hal pembuatan, pelaksanaan tertib hukum, yang dapat meningkatkan citra dan wibawa pemerintah dan pengawasan produk-produk hukum agar benar-benar aspiratif.
6. Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dengan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum.
7. Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum dan juga senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukumnya.
8. Memperkuat fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang ras, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.
9. Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pekraman, banjar dan berbagai sekaa.
10. Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan Bali khususnya, sehingga tidak



terjebak dan dimanfaatkan sebagai pilar-pilar untuk menyangga kepentingan politik aliran ataupun sektaran.

11. Mewujudkan penyelesaian kasus sosial dan adat di Bali secara damai.
12. Menciptakan keamanan yang kondusif dan kewaspadaan dini.